



PEMETAAN HAMBATAN NON-TARIF DI NEGARA- NEGARA BRICS PLUS TERHADAP EKSPOR INDONESIA

Rasbin*

Abstrak

Negara-negara BRICS Plus (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Iran, dan Ethiopia), dengan kontribusi besar terhadap PDB dan populasi global, merupakan pasar strategis bagi ekspor Indonesia. Namun, hambatan non-tarif (NTBs) di kawasan tersebut menjadi tantangan utama dalam memperluas akses pasar Indonesia ke BRICS Plus. Tulisan ini memetakan secara sistematis NTBs yang dihadapi ekspor Indonesia ke negara-negara BRICS Plus. Temuan menunjukkan bahwa regulasi teknis, sanitasi dan fitosanitasi (SPS)/technical barriers to trade, kuota impor, subsidi, prosedur kepabeanan, serta hambatan administratif dan lisensi masih dominan dalam NTBs di BRICS Plus. Komisi VI DPR RI perlu mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, untuk (1) memperkuat diplomasi teknis dan ekonomi, (2) menyediakan layanan informasi pasar yang akurat dan mutakhir, (3) mengupayakan harmonisasi standar nasional dengan standar negara tujuan ekspor, (4) memberikan dukungan kepada pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan teknis dan SPS, dan (5) memetakan NTBs dan dampaknya secara berkala.

Pendahuluan

Selama dua dekade terakhir, lanskap perdagangan internasional telah mengalami perubahan besar, ditandai dengan meningkatnya kompleksitas kebijakan perdagangan, khususnya dalam bentuk hambatan non-tarif (NTBs). Di tengah berbagai upaya liberalisasi tarif, banyak negara justru mengalihkan perlindungan industrinya dari tarif ke instrumen non-tarif.

Walaupun tidak bersifat langsung sebagaimana tarif, NTBs terbukti secara signifikan membatasi akses pasar, meningkatkan biaya transaksi, serta menurunkan daya saing produk ekspor. Sekitar 90% perdagangan global dipengaruhi oleh NTBs, yang dampaknya secara agregat diperkirakan tiga kali lebih besar dibandingkan tarif (Ferrantino, 2016). Ini menandakan peran dominan NTBs dalam membentuk arus perdagangan internasional (Ferrantino, 2016; Muradovna, 2020). Dalam konteks global yang cenderung mengarah pada proteksionisme, analisis terhadap NTBs menjadi sangat krusial.

Negara-negara BRICS Plus—sekelompok negara yang mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Iran, Ethiopia, dan Indonesia—menyumbang 37% produk domestik bruto (PDB) dunia dan 46% populasi global

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: rasbin@dpr.go.id

pada 2024 (Revindo et al., 2025), namun terdapat hambatan untuk akses pasar ke wilayah ini. Sejumlah studi, seperti Carneiro (2015), menunjukkan bahwa negara-negara BRICS Plus menggunakan instrumen NTBs yang bersifat diskriminatif atau kurang transparan terhadap produk ekspor dari negara lain, termasuk Indonesia. Kondisi ini mendorong pentingnya melakukan pemetaan sistematis terhadap bentuk dan tingkat intensitas NTBs di negara-negara BRICS Plus terhadap ekspor Indonesia. Tulisan ini bertujuan memetakan secara sistematis NTBs yang dihadapi ekspor Indonesia ke negara-negara BRICS Plus.

Kinerja Ekspor Indonesia-BRICS Plus

Sebagai kelompok negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat dan kontribusi signifikan terhadap perdagangan global, BRICS Plus telah menjadi mitra dagang strategis bagi Indonesia. Hal ini terlihat pada kinerja ekspor Indonesia ke negara-negara BRICS Plus sepanjang periode 2020–2024 yang secara umum mengalami peningkatan. Data TradeMap menunjukkan bahwa pada 2020, nilai ekspor tercatat sebesar 30%, kemudian naik menjadi 33% pada 2021, 34% pada 2022, dan mencapai 36,5% pada 2023, sebelum sedikit terkoreksi ke 35,5% pada 2024. Data ini mengindikasikan bahwa dalam tiga tahun terakhir, sekitar sepertiga ekspor Indonesia ditujukan ke negara-negara BRICS Plus. Fakta tersebut memperkuat posisi BRICS Plus sebagai pasar utama bagi produk Indonesia.

Di antara negara-negara BRICS Plus, Tiongkok menjadi mitra dagang paling dominan dengan pangsa ekspor mencapai 65–70% dari total ekspor Indonesia ke BRICS Plus. Posisi tersebut konsisten sepanjang periode 2020–2024, menunjukkan ketergantungan yang tinggi dari Indonesia terhadap pasar Tiongkok. India menempati posisi kedua dengan kontribusi ekspor sekitar 17–21%, sementara Uni Emirat Arab (UEA) menyumbang porsi yang jauh lebih kecil, sekitar 3,0%. Dominasi Tiongkok dan India dalam struktur ekspor Indonesia ke BRICS Plus menekankan urgensi strategi diplomasi dan ekonomi yang terfokus pada kedua negara tersebut guna menjaga dan meningkatkan kinerja ekspor nasional.

Sepanjang periode 2020–2024, ekspor Indonesia ke negara-negara BRICS Plus didominasi oleh tiga kelompok produk utama, yakni HS27 (bahan bakar mineral), HS72 (besi dan baja), serta HS15 (lemak dan minyak hewani/nabati). Data TradeMap menunjukkan bahwa rata-rata nilai ekspor masing-masing produk tersebut tercatat sebesar US\$22 miliar untuk HS27, US\$16,1 miliar untuk HS72, dan US\$12,6 miliar untuk HS15. Dari total ekspor nasional masing-masing komoditas, sekitar 43,1% produk HS27, 71,6% produk HS72, dan 43,8% produk HS15 dialokasikan ke pasar BRICS Plus. Hal ini menunjukkan bahwa BRICS Plus merupakan pasar utama bagi komoditas unggulan Indonesia yang didominasi oleh komoditas primer, khususnya energi dan bahan mentah.

Hambatan non-Tarif BRICS Plus

Meskipun negara-negara BRICS Plus secara kolektif menawarkan potensi pasar yang besar dalam perdagangan global, tingkat hambatan perdagangan yang masih tinggi menunjukkan tantangan serius bagi akses ekspor, termasuk Indonesia. Secara lengkap, jenis-jenis NTBs

seperti regulasi teknis, sanitasi dan fitosanitasi (SPS)/*technical barriers to trade* (TBT), kuota impor, subsidi, prosedur kepabeanan, serta hambatan administratif dan lisensi di BRICS Plus disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hambatan non-Tarif (NTBs) di BRICS Plus

Negara	Jenis-Jenis NTBs
Brazil	Sertifikasi Inmetro alat listrik dan otomotif; kuota impor baja dan baja bersalut; kuota berjenjang untuk gula; subsidi produksi etanol dan pertanian; birokrasi kepabeanan lambat.
Rusia	Sertifikasi keamanan untuk daging dan produk pertanian; inspeksi khusus (kelapa sawit dan hortikultura); kuota impor gula, daging, dan beras di bawah skema kuota tahunan WTO; subsidi sektor energi (minyak, gas, batubara) dan pertanian; verifikasi ganda dokumen impor dan memanfaatkan sistem persetujuan perdagangan.
India	Sertifikasi Bureau of Indian Standards (BIS) untuk berbagai barang; batas residu pestisida (MRL) sangat ketat untuk minyak sawit dari Indonesia; kuota musiman impor gula dan kapas, dan safeguard kuota pada impor karet; subsidi pupuk, gula, bahan pangan lokal, dan bahan bakar; birokrasi kepabeanan lambat; sistem “ <i>restricted</i> ” dan “ <i>prohibited</i> ” list perlu izin khusus.
Tiongkok	China Compulsory Certification (CCC) untuk produk elektronik dan otomotif; sertifikasi keamanan daging dan produk pertanian, serta inspeksi khusus untuk kelapa sawit dan hortikultura; kuota impor gula, kapas, dan bahan baku kimia; subsidi sektor energi terbarukan dan industri baja; sertifikat tambahan untuk raw material tertentu (kayu, karet); lisensi impor ampas kertas, limbah plastik, serta regulasi ekspor chip semikonduktor.
Afrika Selatan	Sertifikat dari South African Bureau of Standards (SABS); sertifikat SPS dan implementasi MRL; izin impor produk beras dan gula.
Arab Saudi	<i>Certificate of Conformity (CoC)</i> dari otoritas yang ditunjuk; menggunakan kandungan lokal yang cukup tinggi; dokumen legalisasi lengkap dan surat kuasa; standar label dan penggunaan kata “Arabian Gulf”.
Uni Emirat Arab	Sertifikasi halal produk pangan atau label bilingual Arab-Inggris; perlu distributor atau agen lokal agar produk dapat dipasarkan; dokumen pelengkap dan lisensi impor untuk produk tertentu.
Mesir	<i>CoC</i> ; inspeksi kualitas melalui <i>General Organization for Export and Import Control (GOEIC)</i> , MRL pestisida ketat; pembatasan musiman (bawang, kentang) dan <i>state trading enterprises</i> (gula, gandum); subsidi gandum, gula, roti; dukungan harga pertanian; banyak dokumen; <i>single window</i> Nafeza belum optimal; inspeksi fisik umum; perlu registrasi di GOEIC untuk produk impor.
Iran	<i>CoC</i> dan pengujian produk di laboratorium yang diakui Iran; sertifikat kesehatan dari otoritas negara pengekspor yang diakui oleh Iran, standar pangan ketat, karantina lama; kuota untuk gandum, gula, beras, dan daging; subsidi bahan bakar (minyak, gas), pupuk, dan gandum, serta harga dukungan pertanian; proses impor bergantung pada dokumen fisik dan inspeksi fisik, serta hambatan sanksi internasional; lisensi impor dibutuhkan untuk banyak kategori barang, daftar <i>prohibited imports</i> ; registrasi pabrik pangan/farmasi.
Ethiopia	<i>CoC</i> dari lembaga yang diakui pemerintah Ethiopia; standar keamanan pangan, batas residu pestisida, dan pemeriksaan kualitas; pembatasan volume impor melalui <i>state trading enterprises</i> (misalnya gandum dan gula); subsidi pupuk, benih, dan irigasi; harga dukungan gandum/teff; dokumen impor yang banyak dan digitalisasi masih terbatas; lisensi impor dan izin khusus.

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber

NTBs di negara-negara BRICS Plus memiliki karakteristik yang beragam dan tingkat kompleksitas yang tinggi. Berdasarkan International Trade Barrier Index 2025 yang diterbitkan oleh Tholos Foundation, sebagian besar anggota BRICS Plus menempati peringkat rendah dalam hal keterbukaan perdagangan, terutama akibat dominasi kebijakan non-tarif. Dalam laporan tersebut tercatat Brasil berada di peringkat 109, Rusia 121, India 120, Tiongkok 114, Afrika Selatan 40, Uni Emirat Arab 20, Mesir 82, dan Arab Saudi 71 (Tholos Foundation, 2025). Posisi ini mencerminkan besarnya intensitas penggunaan NTBs yang secara signifikan membatasi arus perdagangan internasional. Secara khusus, NTBs di BRICS Plus akan menghambat ekspansi Indonesia ke negara-negara tersebut, meskipun potensi seperti minyak sawit mencapai US\$9,8 juta, produk rumah tangga US\$32,9 juta, dan ikan sardines US\$23 juta (Indonesia Eximbank, 2025).

Keberagaman jenis NTBs yang diterapkan di negara-negara BRICS Plus meningkatkan biaya kepatuhan dan menjadi hambatan bagi ekspor Indonesia. Untuk memitigasi dampaknya, Indonesia perlu: (1) melakukan negosiasi bilateral maupun multilateral guna mengurangi hambatan SPS, menyelaraskan standar teknis, dan memastikan kesetaraan akses pasar; (2) menyiapkan sertifikasi internasional bagi komoditas ekspor utama agar memenuhi ketentuan SPS/TBT seperti CCC, BIS, Inmetro, atau sertifikat negara-negara BRICS Plus lainnya; (3) mempercepat penyesuaian produk seperti sawit, tekstil, dan elektronik dengan regulasi pasar BRICS; serta (4) menerapkan strategi diplomasi ekonomi dan advokasi di WTO, termasuk memanfaatkan *Trade Policy Review* dan mekanisme penyelesaian sengketa bila diperlukan.

Penutup

Secara kolektif, negara-negara BRICS Plus merupakan pasar potensial yang menjanjikan bagi ekspor Indonesia. Namun, tingginya NTBs yang diberlakukan di kawasan tersebut mencerminkan tantangan nyata yang harus dihadapi dalam memperluas akses pasar ekspor Indonesia. DPR RI melalui Komisi VI perlu memastikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perdagangan harus memperkuat diplomasi teknis dan ekonomi melalui negosiasi pengakuan sertifikasi, advokasi di forum multilateral, serta perluasan perjanjian dagang bilateral. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan layanan informasi regulasi pasar yang akurat dan terkini, mendorong harmonisasi standar domestik dengan pasar tujuan ekspor, serta mendukung pelaku usaha dalam pemenuhan standar teknis dan SPS. Pemetaan berkala terhadap NTBs dan dampaknya juga penting untuk merumuskan kebijakan berbasis data yang responsif dan efektif.

Referensi

- Carneiro, F. L. (2015). Non-tariff measures as trade policy instrument: Concept, importance and recent evidence of its use in Brazil. *BEPI*, 19, 21-35.
- Ferrantino, M. J. (2016). Non-tariff measures. In K. Heydon & S. Woolcock (Eds.), *The Ashgate Research Companion to International Trade Policy* (pp. 91–105). Ashgate.
- Indonesia Eximbank. (2025, April 30). Indonesia's export opportunities amid potential challenges of US-China tariff war. <https://www.indonesiaeximbank.go.id/public-information/peluang-ekspor-indonesia-di-tengah-tantangan-potensi-perang-tarif-amerika-serikat-dan-tiongkok>
- Muradovna, I. N. (2020). Impact of tariffs and nontariff barriers on the international trade. *International Journal of Science and Management Studies*, 3(6), 72–80. <https://doi.org/10.51386/25815946/ijsms-v3i6p105>
- Revindo, M.D., Sabrina, S., & Elisabeth, C.R. (2025). Akses BRICS: Potensi dan tantangan bagi perekonomian Indonesia. *Trade and Industry Brief*, 8(3), 1-34.
- Tholos Foundation. (2025). *International trade barrier index 2025*. <https://www.tradebarrierindex.org/full-report>

